

**PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK
PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGKITAN BANGSA (PPKB)
DI DPRD D.I. YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
MOHAMMAD MUSHOFFA
07370008

PEMBIMBING
1. DR. AHMAD YANI ANSHORI
2. DRS. H. KAMSI, MA.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Mushoffa

NIM : 07370008

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 April 2011

Yang menyatakan,

Mohammad Mushoffa
NIM : 07370008

ABSTRAK

Posisi perempuan yang selama ini cenderung menjadi objek dari pada subjek dalam pembangunan nasional merupakan hal yang dirasa tidak adil bagi perempuan. Ruang gerak mereka dibatasi dalam wilayah domestik, mereka tidak diberi ruang untuk berperan dan berpartisipasi dalam wilayah publik apalagi berperan dan berpartisipasi dalam wilayah politik praktis dan bahkan cenderung diabaikan atau bahkan dipinggirkan.

Sesungguhnya ide normatif Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena Islam membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan UU Politik dan Pemilu secara jelas mengakomodir perempuan untuk bisa berperan dan berpartisipasi lebih luas lagi. Tidak hanya dalam wilayah domestik tetapi mereka diberi ruang untuk bisa berperan dan berpartisipasi dalam wilayah publik dalam hal ini berperan dan berpartisipasi dalam politik praktis. Karena UU mengharuskan 30% kepengurusan partai politik dan calon wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif adalah perempuan termasuk juga dalam pemerintahan.

Perbedaan pendapat diantara para tokoh atau ulama' cenderung hanya pada tataran cara pandang mereka terhadap teks-teks al-Qur'an yang sesungguhnya, al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan dengan jelas bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan dihadapan Allah SWT.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *field research*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pustaka, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan metode pengumpulan data-data dari lapangan dengan teknik wawancara dengan kader PPKB yang duduk di DPRD DIY. Adapun sifat penelitian yaitu menggunakan *deskriptik-analitik* yaitu menggambarkan bagaimana peran dan partisipasi kader PPKB di DPRD DIY apakah sesuai dengan kajian *Siyasah syar'iyah* dengan pendekatan penelitian *historis-normatif* berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Setelah diadakan penelitian terhadap peran dan partisipasi kader PPKB di DPRD DIY dapat ditarik kesimpulan bahwa kader PPKB telah melakukan peranan dan partisipasinya sebagai jembatan yang berfungsi sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh kader PPKB seperti halnya kurang efektifnya lobi politik dalam internal partai masih ditemukan nilai ketidakadilan dalam memperjuangkan kaum perempuan hal ini karena kader PPKB lebih mengutamakan perempuan Nahdliyin.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Mushoffa

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohmmad Mushoffa

NIM : 07370008

Judul Skripsi : **Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan
Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD D.I.
Yogyakarta Periode 2009-2014**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2011

16 Jumadil Akhir 1432

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.19731105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Mushoffa

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Mushoffa

NIM : 07370008

Judul Skripsi : **Peran Dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan
Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD D.I.
Yogyakarta Periode 2009-2014**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2011
16 Jumadil Akhir 1432

Pembimbing/II

Drs. H. Kamsi, MA

NIP.19570207 198703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/265/2011

Skrripsi dengan Judul: **PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK
PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGKITAN
BANGSA (PPKB) DI DPRD D.I. YOGYAKARTA
PERIODE 2009-2014**

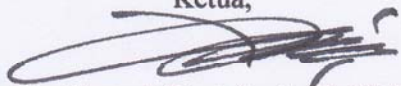
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohammad Mushoffa
NIM : 07370008
Telah di Munaqosyahkan pada : Jum'at 17 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A-

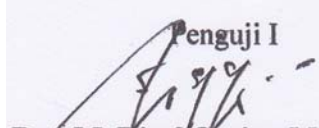
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

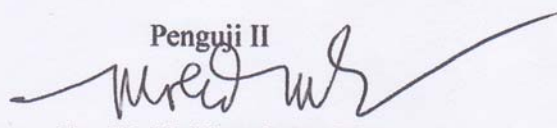
Ketua,


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Drs. M. Rizal Gosim, M.Si
Nip. 19630131 199203 1 004

Penguji II


Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Nip. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2011

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dekan,


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūt{ah diakhir kata

- a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fit}ri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fath}ah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	D}ammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fath}ah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Maji>d

- d. D}ammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd}

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fath}ah dan ya' mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fath}ah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd}

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عِلِمَ فَقَدْ جَهِلَ

“Seorang dikatakan berilmu, jika ia masih mau belajar. Dan jika ia merasa telah berilmu, sungguh sebenarnya ia bodoh”

*(Ibnul Mubarak)**

* Drs. H.M. Budiyanto. *Profil Ustadz Ideal (Etika guru Dalam Pendidikan Islam)*. (Yogyakarta : LPTQ Nasional, Yayasan Team Tadarus “AMM” Yogyakarta, 2003) hlm. 16

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Almamater Tercinta Jurusan Jinayah Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Kedua Orang Tua Tercinta Yang Telah Mendidik

Penyusun Sampai Bisa Seperti Sekarang Ini.....

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة
والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين, أمّا بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Thank You Allah atas rahmat, taufiq dan hidayah-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini dengan judul *”Peran Dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di DPRD D.I. Yogyakarta”* tanpa ada halangan yang cukup berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan pada dunia dan jagat raya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan jasanya kepada penulis. Oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Kamsi, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Segenap Dosen beserta Karyawan Karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Al Mukarrom K.H Najib Salimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Luqmaniah Yogyakarta dan *asatidz* atas bimbingannya dalam *Thalabul 'ilmi*.
7. Bapak dan Ibu di rumah yang tercinta, yang telah mendidik, membesarkan memberikan kasih sayang tiada tara dan selalu mendo'akan tiada henti kepada penulis.
8. Adik-adikku tersayang, Nila, Firdaus yang telah memberikan warna-warni hidup penulis baik dikala susah maupun senang.
9. Seorang yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Para teman-teman santri Pondok Pesantren Al luqmaniah atas Do'a dan Semangat yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat penulis sebutkan di sini.

Kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal bahkan lebih banyak lagi. Teriring do'a semoga mereka senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang-Nya baik di dunia maupun di akhirat.

Demikian sekilas kata pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu sudi kiranya kepada pembaca untuk bisa memberikan masukan yang membangun guna penyusunan karya-karya yang lain. Semoga apa yang telah tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.....

Yogyakarta, 25 April 2011
Penulis

Mohammad Mushoffa
NIM. 07370008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6

E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : PEREMPUAN DALAM POLITIK PERSPEKTIF ISLAM.....	15
A. Peran Perempuan Dalam Politik Perspektif Islam	15
B. Etika Keterlibatan Perempuan Dalam Politik	18
BAB III : GAMBARAN UMUM PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGKITAN	
BANGSA (PPKB).....	32
A. Sejarah Berdirinya Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa	32
B. Mekanisme Kerja Organisasi	38
C. Bentuk Implementasi Program Dalam Aktifitas Lapangan	45
D. Jumlah Kader PPKB Di DPRD DIY	46
E. Peran dan Partisipasi Politik Kader PPKB Di DPRD	49
BAB IV : ANALISIS PERAN DAN PARTISIPASI KADER PPKB DI DPRD	
DIY.....	60
A. Keefektifan Peran Kader PPKB Di DPRD DIY	60
B. Partisipasi Kader PPKB Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat	62
C. Peran dan Partisipasi Politik Kader PPKB Dalam Perspektif Fiqh Siyash	65

BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Kutipan Terjemah Al-Qur'an dan Al-Hadits.....	I
Struktur Kepengurusan PPKB.....	III
Struktur Fraksi Kebangkitan Bangsa.....	V
Daftar Pertanyaan Wawancara.....	VI
Surat Rekomendasi Riset.....	VII
Surat Izin Penelitian.....	VIII
Surat Bukti Penelitian.....	X
Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mungkinkah demokrasi tanpa keterlibatan perempuan?¹ Itulah pertanyaan yang selalu mengusik banyak kalangan. Selama ini perempuan benar-benar ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus utama pada manusia. Perempuan lebih banyak menjadi objek pembangunan dari pada subjek pembangunan, bahkan peran serta keterlibatan perempuan selama ini hanya pada tatanan konsep, perempuan tidak diberi ruang untuk menentukan kebijakan, bahkan yang menyangkut dengan kepentingannya.

Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dibayangkan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan telah terbentuk manusia oleh budaya patrilineal² yang menjadikan peranan perempuan hanya dibatasi pada urusan rumah tangga, sedangkan politik yang digambarkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan hanya terhadap laki-laki, perempuan dianggap tabu dan kontroversial terhadap kekuasaan dan kepemimpinan, bahkan dijadikan objek

¹ Fadmi Sustiwi “*Demokrasi Tanpa Partisipasi Perempuan?*”. Dalam *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 7 Juni 1999, hlm. 6.

² Kebudayaan yang mengunggulkan laki-laki dalam semua lini kehidupan dan menjadikannya sebagai parameter kesempurnaan. Budaya patriarki merupakan suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat yang memihak laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih rasional sehingga berhak mendominasi atau melindungi perempuan sebagai makhluk irasional dan lemah. Lihat Kamla Bashin, *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Bentang, 1993), hlm. 3. Dalam bentuk khususnya, keluarga Arab sangat patriarkal hierarkis dalam hubungannya dengan usia dan jenis kelamin. Dalam struktur ini gender menjadi sangat terpolarisasi; pria harus kuat dan dominan sedangkan perempuan harus lemah, bergantung pada pria dan rendah. Mai Yamami (ed) *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra* (Bandung: Nuansa, 2000), hlm. 125.

hujatan. Padahal secara teologis antara laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat dan semartabat.³

Ide normatif Islam juga membawa nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi makhluk baik laki-laki dan perempuan,⁴ sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

هن لباس لكم وانتم لباس لهن⁵

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة⁶

Sedangkan pada realitanya sering menunjukkan hal yang sebaliknya, agama sering tampil dalam pandangan dunia laki-laki saja yang meletakkan perempuan hanya sebagai objek. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan menyangkut persoalan mereka sendiri. Sehingga acuan normatif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ternyata *ambivalen* dengan fakta-fakta di lapangan.⁷

³ Derajat dan martabat itu tidak dihitung secara anatomis, ia adalah sebuah kepribadian yang mulia, kejujuran, ketakwaan dan amanah; ia tercermin pada setiap perilaku dalam keseharian, yang bermula dan berakhir pada kesadaran moral, bukan pada sebuah pembuktian klinis berdasarkan jenis kelamin. Zulkarnaini Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan?* (Yogyakarta: ARRUIZ, 2003), hlm. 7.

⁴ Bahwa salah satu misi pokok al-Qur'an adalah memposisikan sejajar antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian tidak berlebihan kalau dikatakan, bahwa menulis isu sekitar status perempuan dalam islam, lebih-lebih kalau berusaha membuktikan bahwa posisi perempuan yang ingin diletakkan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah mensejajarkannya dengan laki-laki, berarti sama artinya dengan memperjuangkan pembumian ajaran al-Qur'an dan sunnah. Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: TAZZAFI dan ACAdEMIA, 2002), hlm. 2.

⁵ Al-Baqarah (2) : 187

⁶ An-Nahl (16) : 97

⁷ Budhy Munawar Rahman “ *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme Kepada Kesetaraan*”, dalam Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 187.

Pemahaman yang tepat tentang kesetaraan dan keadilan yang didasarkan pada ajaran agama akan menjadi landasan yang sangat diperlukan, agar jurang pemisah hak-hak antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi.⁸ Dengan konfigurasi persoalan di atas, maka persoalan yang ditemukan adalah bahwa sebenarnya telah terjadi benturan-benturan yang bersifat konseptual terkait dengan interpretasi normatif mengenai bagaimana sesungguhnya kedudukan dan hak-hak perempuan dimata legislasi islam.

Untuk itu sosialisasi tentang konsep pemberdayaan perempuan (*empowering*) sangat diperlukan, lebih-lebih pemberdayaan pada sektor hak-hak politik sebagai penguatan pada wilayah publik secara intens dan continue agar terjamin efektifitasnya. Selanjutnya, berikut beberapa hal yang menjadi dasar dilakukanya penelitian ini terkait masih lemahnya posisi perempuan dalam kancah politik, yaitu :

Pertama, terkait subordinasi dan marginalisasinya posisi perempuan sebagai implikasi penafsiran agama yang bias gender, maka pemberdayaan peran politik perempuan itu sangat penting dilakukan. Dalam hal ini M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa salah satu dari tiga hak yang merupakan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan adalah hak dalam bidang politik.⁹ Sehingga pada dasarnya keinginan perempuan untuk memenuhi kuota 30% di parlemen dan pemerintahan sebagai wujud partisipasi mereka dalam bidang politik bukanlah hal yang melampaui batas kodrati perempuan. Karena secara *eksplisit* Undang-undang

⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 14.

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 275.

mengharuskan partai politik menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan partai.¹⁰

Kedua, untuk itu *rekontruksi* terhadap teks-teks keagamaan, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah politik. Pandangan fiqh klasik sejatinya dibaca dalam konteks dan semangat zamanya, untuk itu diperlukan pembacaan kritis dan *dekontruksionis* guna melihat makna substansif dibalik teks-teks tersebut. Kemudian perlu kontekstualisasi konsep fiqh¹¹ klasik dengan problematika kemanusiaan kontemporer, dalam hal ini persoalan-persoalan gender yang terkait dengan masalah perempuan di dalam ruang politik.

Dengan kondisi perempuan tersebut maka muncullah gerakan-gerakan perempuan yang *concern* terhadap perempuan termasuk dalam kaitan ini partai politik yang mendukung keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai dan pemerintahan serta lembaga legislatif, agar perempuan bisa berperan lebih aktif dalam ruang publik.

Maka dari itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan badan yang membidangi lahirnya Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) organisasi yang *concern* terhadap pemberdayaan politik perempuan sangat mendukung keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Menurut PPKB sendiri pemberdayaan perempuan dalam ranah politik adalah peningkatan dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, melalui berbagai cara, baik yang

¹⁰ Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang 30% Perempuan Dalam Kepengurusan Partai pasal 2 ayat (5)

¹¹ Dengan demikian fiqh dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu merespon tuntutan dan kebutuhan umat. Sebab, bagaimanapun juga perubahan zaman, realitas empiris yang fluktuatif merupakan sunnatullah dan realitas sejarah yang tidak bisa dinafikan. Agar dapat merespon dinamika sosial masyarakat yang seperti itu, dibutuhkan kerangka teoritik yang fleksibel, tanpa harus terlarut dalam “*Ideologi Sosial*”, KH. MA. Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: CERMIN, 1999), hlm. 149.

formal, nonformal, kelompok diskusi maupun training-training baik yang mandiri maupun bekerjasama dengan mitra seperti IRI, FNST, NDI, IRCOS dan lembaga lainnya.

Selanjutnya, ketertarikan penyusun dalam penelitian di PPKB adalah terkait dengan status PPKB yang merupakan banom dari PKB, yakni secara organisatoris dan ideologis PKB masih berada di lingkungan NU yang notabene adalah organisasi masyarakat yang membidangi kelahirannya.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan skripsi ini agar terfokus maka penyusun dalam membahas hanya mengambil masalah yang berkaitan dengan peran dan partisipasi politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB).

Bertolak dari sebuah latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang kami temukan akar masalah yang akan menjadi sentral pemikiran penyusun yakni:

Bagaimana peran dan partisipasi politik kader PPKB di DPRD D.I. Yogyakarta periode 2009-2014 dalam perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian

Secara substansial, penyusunan skripsi ini dengan mengambil pokok persoalan yang telah disebutkan di atas memiliki tujuan :

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran dan partisipasi politik Kader Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DIY 2009-2014.

2. Untuk menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap peranan dan partisipasi perempuan dalam politik.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menambah wawasan tentang politik, terutama yang berkaitan dengan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia.
2. Untuk menginformasikan kepada masyarakat seberapa besar peran dan partisipasi politik Kader PPKB di lembaga legislatif.
3. Sebagai kontribusi baru bagi khazanah pengetahuan dan kepustakaan, terutama masalah perkembangan perempuan terkait peranan dan partisipasinya dalam dunia politik.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian seputar masalah peran dan partisipasi politik PPKB, penyusun perlu melakukan penelusuran berbagai literatur yang berhasil dikumpulkan, sejauh ini penelitian yang berkaitan dengan perempuan terjun di dunia politik sudah cukup banyak, namun dengan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah berbagai literatur, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Dari literature-literatur ini diharapkan bisa membantu dan memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih tentang permasalahan yang penyusun teliti.

Hasil temuan literatur tersebut diantaranya: Buku karya Syafiq Hasyim “*Hal-hal yang Tak Terpikirkan*”. Buku ini mengupas tentang isu-isu keperempuanan dalam islam, di dalamnya juga memuat mengenai hak-hak politik perempuan dalam fiqh politik serta kedudukan perempuan dalam dunia fiqh secara umum.¹²

Buku yang berjudul “*Tiada Demokrasi Sejati Tanpa Keterwakilan Perempuan*”. Buku yang diterbitkan oleh PPKB yang berisi tentang hasil keputusan Musyawarah Nasional I dan Muktamar Luar Biasa PPKB Periode 2002-2007.¹³

Buku karya Mansour Fakih, Ratna Megawangi, Siti Ruhaini Dzuhayatur, Budhy Munawar Rachman “*Membincang Feminisme*”. Buku ini membahas tentang masalah gender dalam berbagai sudut pandang sekaligus menjelaskan, bahwa perempuan dihadapan Allah SWT mendapatkan tempat yang terhormat, sama dengan laki-laki, buku ini juga mengingatkan kembali akan kebutuhan wahyu dalam membangun wacana keperempuanan, baik untuk keperluan teori, maupun aksi.¹⁴

Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, yang diterbitkan oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, buku ini berisi tentang

¹² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. I (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 13.

¹³ PPKB, *Tiada Demokrasi Tanpa Keterwakilan Perempuan*, cet. 3 (Jakarta: DPP. PPKB, 2007)

¹⁴ Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme*, hlm. Vi

program penguatan hak-hak perempuan dalam fiqh, seperti hak politik perempuan dan lain-lain.¹⁵

Skripsi yang disusun oleh Rahmah Maulida¹⁶ yang mengupas tentang hak-hak politik perempuan dalam konvensi internasional (Convention on The Right of Women).

Skripsi yang disusun oleh Rochimatun¹⁷ yang meneliti tentang masalah pemberdayaan perempuan di tiga pondok pesantren (Wahid Hasyim, Nurul Ummah, dan Ali Maksum) yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Secara normatif pesan moral yang ada pada setiap pemikiran merupakan respon dari kebutuhan, atau berusaha akan menjawab kebutuhan masyarakat pada masanya. Pengaruh sosiologis pun ikut mewarnai pemikiran yang perlu diperhitungkan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi sosial tentang kedudukan perempuan dalam islam yang dirasa masih bias gender.¹⁸

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa perempuan adalah seperti laki-laki, baik dalam hal penciptaanya, amal perbuatanya serta pahalanya. Laki-laki dan perempuan adalah merupakan satu pasangan serta sama-sama mempunyai

¹⁵ YKF, *Panduan Pengajaran Fiqh di pesanteren*, cet. I (Yogyakarta: YKF dan FF, 2002), hlm. ii.

¹⁶ Rahmah Maulida “*Hak-hak Politik dalam konvensi Internasional Ditinjau Dari perspektif Islam*,” skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁷ Rochimatun, “*Pemberdayaan Perempuan*” oleh YKF di pondok pesanteren, “ skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁸ M. Hidayat Nur Wahid “Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang Hadits Misoginis”, dalam Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme*, hlm. 30.

tanggung jawab yang sama kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة¹⁹

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضهم من بعض²⁰

Dalam era-globalisasi, pembangunan nasional dan konteks sumber daya manusia, maka keterlibatan antara kaum perempuan dan laki-laki adalah hal yang esensial. Oleh karena itu kepedulian holistik sangat diperlukan, yang melihat perempuan dari sudut kepemimpinan di muka bumi ini, dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai luhur bangsa, perlu disinergikan dalam konteks dimensi publik dan domestik secara bersamaan. Di mana dimensi publik mengaitkan perempuan di bidang iptek, ekonomi, ketenagakejaan, politik, dan ketahanan sosial. Dimensi domestik meliputi aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan harmonis dan lainnya.

Untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam ranah politik terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu politik, peran dan partisipasi. Politik merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama (*Kolektif*) atau pembuatan kebijakan umum masyarakat secara keseluruhan, dengan memakai sarana umum. Sehingga politik meliputi soal siapa dan untuk mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana.²¹

¹⁹ An-Nisa' (4) : 1.

²⁰ Ali-Imran (3) : 195.

²¹ H. Idham Chlid, *Partai Untuk Rakyat*, (Jawa Tengah: LP2KS DPW PKB), hlm. 17.

Definisi politik secara keagamaan yaitu pemimpin yang menangani urusan dan mengatur rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi mereka untuk menunjukkan bagaimana kita mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Politik sangat diperlukan di mana kita tidak bisa terlepas dari permainan politik baik yang diminkan oleh para elit politik maupun orang yang bertujuan untuk memperoleh suatu kedudukan. Dalam hal politik ada beberapa hal yang termaktub di dalamnya, yaitu: 1. Negara (*State*), 2. Kekuasaan (*Power*), 3. Pengambilan keputusan (*Decision Making*), 4. Kebijakan (*Allocation*),²² dalam bukunya Ramlan Surbakti membagi definisi politik menjadi lima, yaitu:

1. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum.
2. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk memberikan dan mewujudkan kebaikan bersama.
4. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.²³

Mengutip dari pandangan Gross, Mason, dan Mc Eachem memberikan pengertian tentang peran dan partisipasi yaitu sebagai perangkat harapan-harapan

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 8.

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo, 1992), hlm. 2.

yang dikaitkan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam kaitanya dengan peran dan partisipasi politiknya, PPKB berupaya menampung dan melindungi seluruh aspirasi kaum perempuan dengan berperan dan berpartisipasi secara langsung melalui lembaga legislatif maupun secara tidak langsung, dalam hal ini PPKB bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintahan (LSM, Pergerakan-pergerakan yang berkaitan dengan perempuan, training-training, dan yang lainnya) agar bias memperjuangkan secara maksimal masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan masalah perempuan.

Di dalam peran dan partisipasi terdapat dua macam harapan, *Pertama*, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban pemegang peran. *Kedua*, harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap orang lain yang memiliki relasi denganya dalam menjalankan perannya.²⁴ Dalam hubungannya dengan peran dan partisipasi politik PPKB dalam keanggotaanya di legislatif tentunya tidak akan pernah lepas dari harapan-harapan yang baik di masyarakat baik oleh para elit maupun pengurus PPKB, khususnya yang duduk di legislatif. Di mana praktek politik yang benar haruslah mendengarkan aspirasi rakyat, terutama kaum perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal dan cara yang prinsipil dalam upaya mencapai satu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam

²⁴ Davud Berry, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99.

penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian tentang Peran dan Partisipasi Politik PPKB Di DPRD D.I.Yogyakarta Periode 2009-2014 penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian “*Field Research*” yaitu penelitian dengan terjun secara langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian atau penelitian lapangan dimana dalam memperoleh data-data penyusun melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang menjadi obyek penelitian atau yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah “*Diskriptik Analitik*”, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*Fact Finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku. Fakta yang akan menjadi obyek di sini adalah peran dan partisipasi yang dilakukan perempuan dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah politik terutama peran dan partisipasi politik yang dimainkan oleh Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB).

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan *historis-normatif*. Pendekatan *historis*, digunakan untuk mengetahui dasar pemikiran serta kondisi

sosial yang mempengaruhi penguatan peran dan partisipasi politik PPKB di DPRD DIY, sementara pendekatan *normatif*, adalah pendekatan terhadap materi yang diteliti.

d. Sumber Data

1. Sumber Primer

Yaitu teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber (*informal*) hal ini dikarenakan anggota PPKB yang duduk di DPRD hanya satu orang atau melalui arsip-arsip dan dokumen yang dimiliki oleh PPKB.

2. Sumber Sekunder

Pendekatan yang dilakukan oleh penyusun dengan cara mengumpulkan data-data dari perpustakaan atau pengumpulan data pustaka dari buku-buku yang digunakan sebagai acuan dan relevansinya dalam masalah yang sedang penyusun teliti.

3. Sumber-sumber lain atau data tertentu yang diperoleh dari pendapat-pendapat personil yang tertulis dalam media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti : Koran, Majalah, dan yang lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini²⁵ akan dianalisis dengan menggunakan metode

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

deduktif dan *interpretatif*.²⁶ Cara berpikir *deduktif* dan *interpretasi* ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi baru mengenai peran dan partisipasi politik kaum perempuan dalam fiqh yang adil dan sensitif gender.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan serta pemahaman skripsi ini maka penyusun menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarahkan kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua penyusun memberikan gambaran umum tentang Pergerakan Perempuan Bangsa (PPKB) yang meliputi sejarah berdirinya, mekanisme kerja, dan bentuk implementasi kerja PPKB.

Bab Ketiga penyusun akan membahas tentang Peran dan Partisipasi Politik PPKB di legislatif, yang meliputi strategi pemberdayaan politik PPKB, peran dan partisipasi politik kaum perempuan dalam perspektif islam.

Bab Keempat, bab ini merupakan penutup dari skripsi penyusun, yang meliputi kesimpulan saran-saran dan lampiran-lampiran.

²⁶ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif, Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kader PPKB sebagai salah satu perwakilan kaum perempuan yang duduk di DPRD yang berada dalam Fraksi PKB setidaknya telah melakukan peranannya guna memperjuangkan aspirasi-aspirasi kaum perempuan dengan semaksimal mungkin, dengan cara melakukan lobi politik terhadap anggota fraksi perempuan di DPRD DIY. Hal ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama kaum perempuan. Akan tetapi dalam upaya lobi politik di internal Fraksi tidak seperti yang diinginkan, hal ini menjadikan peranan kader PPKB sebagai wakil perjuangan kesejahteraan kaum perempuan mendapat hambatan.

Dalam hal partisipasi yang telah dilakukan kader PPKB salah satu diantaranya berpartisipasi dalam upaya membebaskan kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai media cetak selain itu kader PPKB juga melakukan pendekatan langsung terhadap objek yang bersangkutan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Cara ini cukup efektif untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi sangat disayangkan karena bentuk partisipasi kader PPKB tidak lantas secara menyeluruh mengena kepada seluruh lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan kader PPKB yang merupakan badan otonom dari PKB yang berbasis NU dalam melakukan pertisipasinya lebih mengutamakan perempuan Nahdliyin.

Peran dan partisipasi kader PPKB di DPRD DIY dalam pandangan Fiqh siyasah masih kurang nilai-nilai keadilan didalamnya, karena sebagai wakil masyarakat yang berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat harusnya kader PPKB tidak hanya mengutamakan kalangan Nahdliyin saja, karena hal ini akan membahayakan masa depan PPKB, karena secara umum dilihat dari pendukungnya PPKB merupakan organisasi yang tidak hanya dari perempuan Nahdliyin saja. Akan tetapi dalam mengimplementasikan peran dan partisipasi yang dilakukan oleh kader PPKB di DPRD DIY telah sesuai dengan prinsip musyawarah dalam perspektif fiqh siyasah. Hal ini bisa dilihat dari peranan kader PPKB yang mengeluarkan sebuah kebijakan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dalam internal Fraksi.

B. Saran-saran

1. PPKB hendaknya benar-benar menjadi organisasi yang terbuka yang seluas-luasnya, tidak hanya mencari dukungan dari perempuan NU saja akan tetapi seluruh perempuan di Indonesia ini, hal ini jika PPKB ingin menjadi organisasi yang lebih solid dalam percaturan politik.
2. PPKB sebagai sebuah organisasi yang terbuka dan milik perempuan seluruh nusantara dalam melaksanakan peran dan partisipasi politiknya khususnya dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya hendaknya harus benar-benar adil, dalam artian PPKB tidak hanya memprioritaskan perempuan warga NU saja.

3. Hendaknya membangun jaringan yang *concern* terhadap PPKB dan PKB guna peningkatan informasi dan komunikasi warga dan konstituen PKB dengan pengurus.
4. Membangun dan mengembangkan sistem rekrutmen dan peningkatan kapasitas kader PPKB untuk mempersiapkan politisi perempuan PPKB menjadi pengambil keputusan dalam berbagai bidang strategis terutama yang menyangkut masalah perempuan, eksekutif, legislatif dan yudikatif.
5. Perlunya konsolidasi partai, dengan mengembangkan para kader PPKB yang ada diseluruh daerah.
6. Berepegang teguh pada nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah kebijakan.
7. Lebih menginisiatifi lagi kegiatan-kegiatan yang berbentuk keagamaan sebagai fasilitas bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

B. Kelompok Fiqh

Khalik, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: AMZAH, 2005.

C. Kelompok Hadits

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Matan Al-Bukhari*: Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Al-Imam An-Nawawi, *Ar-Riyadlu As-Sholihin*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994.

D. Kelompok Buku

Ahmad, Muntaz (ed), *Teori Politik Islam*, diterjemahkan dari buku State, politics and Islam, Indianapolis: American Trust Publication, 1986.

Asnawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1999.

Althoff Philip, Micheal Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Amal, Ichlasul, Dr, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1998.

Al-Qardawy, Yusuf, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Abdullah, Zulkarnaini, *Mengapa Harus Perempuan*, Yogyakarta: ARRUIZZ, 2003.

- Budiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Cohen J, Bruce, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, terj. Sahasinomara, Jakarta: Reinka cipta.
- Cholid, Idham, *Partai Untuk Rakyat*, Jawa Tengah: LP2Ks DPW PKB.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU dilema Politik Percaturan NU pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Djazuli, H.A, Prof, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Feillard, Andree, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Fadhillah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik*, cet I, Jakarta: CV Ramadani, 1991.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat madani*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar E-M, Bandung: Mizan, 1996.
- Hairussalam, Hs, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Musa Yusuf, Muhammad, Prof, Dr, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1998.
- Nahrowi, Imam, *Moralitas Politik PKB*, Malang: Averroes press, 2005.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: ARRUIZZ, 2004.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Granindo, 1992.

Thaha, Idris, *Pergaulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU dibodohi*, Semarang: Ar-Ruz press, 2002.

Zamhari, Hari, Muhammad, *Agama dan Negara Analisis Kritis Politik Nur Cholis Madjid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

E. Kelompok Lain-lain

PPKB Pemberdayaan Perempuan Indonesia dalam era Reformasi, Makalah, Jakarta: 26-27 Februari 1999.

PPKB, *Tiada Demokrasi Tanpa Keterwakilan Perempuan*, Jakarta: DPP PPPKB, 2007.

Sustiwi, Fadmi, *Demokrasi Tanpa Partisipasi Perempuan? Dalam Kedaulatan Rakyat*: Senin, 07 Juni 1999.

Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang 30% Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik.

Lampirn 1

KUTIPAN TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ALHADITS

HLM	FT	BAB I
2	5	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
	6	Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
9	19	Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.
	20	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonanya (dengan Berfirman), "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal diantara kamu baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain.
		BAB II
16	2	Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
16	4	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
19	7	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.
	8	Tidak akan beruntung seorang kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan.
		BAB IV
62	2	Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya
64	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanya diantara kamu rasa

		kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir
	4	Imamah adalah suatu kedudukan / jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia
66	5	Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

STRUKTUR KEPENGURUSAN
DPW PPKB DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA
PRIODE 2011-2016

DEWAN PENASEHAT :

1. Ibu Ir. Hj. Suhami Sukamto
2. Ibu Hj. Fatimatuzzahroh
3. Ibu Hj. Nadhiroh Mujab
4. Ibu Puji Hernani, S.E.
5. Ibu Hj. Siti Mukaromah

DEWAN PENGURUS :

Ketua : Dra. Dyah Isti Narmiyati

Wakil Ketua : Ir. Purwantini

Titi Fatichah

Siti I'anatus Sholihah

Maria Ulfah

Sekretaris : Izzatul Islamiyah, S.E.I.

Wakil Sekretaris : Siti Murdhiyah

Ida Laili

Retno Agustini

Hidayati

Bendahara : Yuli Farhantina, S.E.

Wakil Bendahara : Hj.Rustiyati

Werdi

Esti Kartika Sari

Laily Fauziyah

LEMBAGA-LEMBAGA**Kaderisasi dan Organisasi** : Subiyah

Anggota : Siti Sholikhah
Dwi Retno Wulan
Rahayu Widinuryani, S.H.

Pemenangan Pemilu : Hj.Aswandiyah

Anggota : Muryani Sarimin
Endang Ali Ridho
Sumi Hadiyanah
Mugiyanti

Humas : Titin Nurhayati Badwan

Anggota : Hj.Sri Rahayu
Emi Masruroh
Supriyati
Feni Kurniawati

Pemberdayan Perempuan : Bariyah

Anggota : Indah Jauhar Ratna
Haryanti
Purwaningsih
Khayatun Listianil M.

STRUKTUR FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPRD DIY
PERIODE 2009-2014

Ketua Merangkap Anggota	: H. Sukamto, S.H.
Wakil Ketua Merangkap Anggota	: H.M. Anwar Hamid, S.Sos.
Sekretaris Merangkap Anggota	: H. Abdul Halim Muslih
Anggota-anggota	:1. Dra. Dyah Isti Narmiyati 2. Drs. Rojak Harudin

**DAFTAR PERTANYAAN DALAM MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN
KADER PPKB DI DPRD D.I. YOGYAKARTA**

1. Perkenalan
2. Sekilas gambaran tentang PPKB
3. Apa peran PPKB secara umum di DPRD
4. Bentuk partisipasi seperti apa yang dilakukan PPKB di DPRD
5. Apakah peran yang dilakukan PPKB telah tercapai
6. Apakah peran dan partisipasi PPKB sudah maksimal
7. Bagaimana pemberdayaan politik perempuan menurut PPKB
8. Upaya yang dilakukan PPKB terkait pemberdayaan peran politik perempuan
9. Hubungan PPKB dengan PKB
10. Apakah dalam mengeluarkan kebijakan PKB ikut andil dalam hal itu
11. Pandangan PPKB terkait UU politik yang mengharuskan 30% kuota perempuan disemua lini pemerintahan
12. Sistem pengkaderan PPKB
13. Berapa kader PPKB yang duduk di DPRD D.I. Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fak. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP/00.9/12/2011

Yogyakarta, 17 Maret 2011

Lamp :

Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada

Yth Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Bappeda Prop.D.I.Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlumelakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mintabantuandankerjasama untuk memberikan izin bagimahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Mohammad Mushoffa

NIM : 07370008

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **PERAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN KEBANGKITAN BANGSA (PPKB) DI DPRD D.I. YOGYAKARTA**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

DPW.PKB / Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Di Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

a.n. Dekan



Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (Sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/2040/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta.

Nomor : UIN.02/KJS-SKR/PP.009/12/2011

Tanggal Surat : 17 MARET 2011.

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : MOHAMMAD MUSHOFFA.

NIP/NIM : 07370008.

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Judul : PERAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN KEBANGKITAN BANGSA (PPKB) DI DPRD D.I. YOGYAKARTA.

Lokasi : Prov DIY.

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Mulai tanggal : 17 Maret s/d 17 Juni 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Maret 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
3. Ketua DPRD Prov DIY.
4. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta.
5. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0724
1694/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP/00.9/12/11 Tanggal : 17/03/2011
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : MOHAMMAD MUSHOFFA NO MHS / NIM : 07370008
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : DR. Ahmad Yani Anshori
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGNGKITAN BANGSA (PPKB) DI DPRD D. I. YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17/03/2011 Sampai 17/06/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MOHAMMAD MUSHOFFA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 17-3-2011

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ketua DPW.PKB/PPKB Kota Yogyakarta
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
4. Ybs.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta, Telepon 512688,512820

Yogyakarta, 18 Mei 2011

Nomor : 31/FPKB/DPRD-DIY/V/2011.

Hal : Surat Keterangan

Lampiran : -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD MUSHOFFA

No Mahasiswa : 07370008

Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA

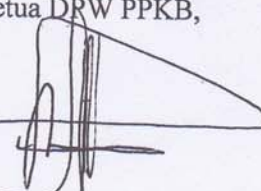
Fakultas / Jurusan : SYARI'AH

Adalah benar-benar telah melakukan riset dengan judul **PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK PERGERAKAN PEREMPUAN KEBANGKITAN BANGSA (PPKB) Di DPRD DIY** pada April 2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua DRW PPKB,



Dra. Dyah Isti Narmiyati

BIODATA DIRI

Nama : Mohammad Mushoffa
TTL : Rembang, 20 Februari 1989
Alamat Asal : Karas, Rt. 01, Rw. 01 Sedan-Rembang.
Alamat Yogya : Jl. Babaran, Gg. Cemani, Kalangan Umbulharjo UH V,
Yogyakarta Telp.(0274)377838 Hp. 087831333377
E-mail : mushoffamoelie@yahoo.co.id
Motto Hidup : TALK LESS DO MORE

PENDIDIKAN :**1. Formal**

- a. MI.Riyadlotut Thalabah Sedan lulus tahun 2001
- b. MTs.Riyadlotut Thalabah Sedan lulus tahun 2004
- c. MA.Raudlatul Ulum Pati lulus tahun 2007
- d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2011

2. Nonformal

- a. Madrasah Diniyah Al-Islah Karas
- b. PP. Al-Kaukabus Sathi' Karas Sedan
- c. PP. Raudlatul Ulum Pati
- d. PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H.Ni'amullah

Ibu : Hj.Maftuhah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta